

## PENGELOLAAN KONSUMSI MENUJU KETAHANAN PANGAN RUMAHTANGGA

Sri Marwanti

(Staf Pengajar di Jurusan/Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UNS)

### ABSTRACT

*Macro food availability which do not enough guarantee household food security especially lower earn household. Lower earn household to use more than half of the earnings to buy food with more than half to buy fundamental food of rice at storey level consume less than AKG and PPH. Decreasing of real earnings and increasing price of rice make weaken food security which still defect rice need management of consumption to race process diversified by food consumption up at more proportional and immeasurable consumption pass socialization guidance of public of gizi well-balanced, development of food product, increase of earning, cheap food intervention for the group of food gristle.*

*Key worthis : food security, gristle food, management of consumption*

### PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan pokok dan komoditi strategis dalam kehidupan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya secara sehat dan produktif, namun kenyataannya menunjukkan, tidak semua orang dapat terpenuhi kebutuhannya sehingga mengalami kelaparan dan rawan pangan. Kekurangan konsumsi pangan dalam jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan dan menurunkan kualitas manusia sebagai sumberdaya pembangunan.

Lahirnya Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan pada KTT Pangan Dunia tahun 1996, dan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Soetrisno, 1995; 1998; FAO, 1996; Marwanti, 2001) merupakan komitmen global dan nasional untuk mencari penyelesaian masalah kekurangan konsumsi pangan dan kondisi rawan pangan serta memperkuat ketahanan pangan setiap orang pada tahun 2020.

Ketahanan pangan merupakan suatu system yang terdiri subsistem produksi, distribusi dan konsumsi pangan dengan 3 aspek penting meliputi ketersediaan, stabilitas penyediaan serta akses individu/rumahtangga untuk mendapatkan pangan yang cukup jumlah, mutu dan ragamnya. Penyediaan pangan yang aman

apabila dapat memenuhi sekitar 115 % dari angka kecukupan konsumsi gizi (AKG konsumsi) untuk hidup sehat dan produktif, yang terdukung dari sistem produksi domestik > 95% dan impor <5%. Kelebihan dari AKG konsumsi digunakan untuk cadangan pemerintah (sekitar 5%) dan cadangan masyarakat (sekitar 10%). Banyak negara atau wilayah dengan penyediaan pangan yang kuat, menghadapi ketidaktahanan konsumsi pangan rumah tangga dengan faktor dominan ketidakmampuan akses pangan.

Ketersediaan dan stabilitas penyediaan pangan terkait dengan usaha produksi pangan, distribusi dan perdagangan, termasuk penyelenggaraan cadangan, ekspor dan impor. Dari data neraca bahan pangan, ketersediaan pangan nasional untuk konsumsi energi penduduk tergolong kuat yang diperoleh dari produksi dalam negeri berkisar 95 persen dan impor sekitar 5 persen, dengan rasio ketersediaan terhadap angka kecukupan melebihi 117 persen (Alexandratos, N, 1995; Marwanti, 2001; BPS, 2002; Suryana, 2004). Kelompok padi-padian menyumbang sekitar 65 persen ketersediaan energi, utamanya beras. Setelah swasembada beras tercapai tahun 1984, Indonesia kembali menjadi pengimpor beras yang besar sejak tahun 1990-an, karena peningkatan produksi beras tidak mampu mengimbangi peningkatan permintaannya baik untuk

konsumsi rumahtangga maupun untuk bahan baku industri.

Ketersediaan pangan yang cukup ditingkat makro (negara, wilayah, pasar) tidak menjamin ketersediaan yang cukup di tingkat rumahtangga karena adanya rintangan kemampuan mengakses pangan yang tersedia cukup di pasar. Rintangan kemampuan akses pangan terutama adalah daya beli (ekonomi) dan daya jangkau (fisik lokasi). Data histories dari hasil SUSENAS BPS sampai tahun 2002 menunjukkan rata-rata konsumsi kalori penduduk Indonesia belum mencapai AKG (angka kecukupan gizi) yang direkomendasikan oleh WHO maupun WKPG dan belum memilih ragam pangan yang memenuhi PPH (pola pangan harapan), terutama pada golongan penduduk berkecukupan rendah dan menengah (BPS, 2000; 2003; Marwanti, 2002, Martianto dan Ariani, 2004).

**PERKEMBANGAN KONSUMSI PANGAN**

Konsumsi kalori selama tahun 1993-2002 belum memenuhi AKG energi, namun sudah ada peningkatan jumlah maupun mutu konsumsi. Rasio konsumsi energi

terhadap AKG sebesar 85 persen pada tahun 1993 menjadi 90 persen pada tahun 2002, bersumber dari 13 kelompok makanan dan sebagai penyumbang terbesar kelompok padi-padian dengan kecenderungan menurun yaitu 64 persen pada tahun 1993 menjadi 52 persen pada tahun 2002 (BPS, 2000;2003). Menurunnya sumbangan padi-padian bersamaan dengan meningkatnya sumbangan 12 kelompok makanan yang lain sehingga meningkatkan skor mutu gizi yang ditunjukkan oleh skor PPH dari 66,2 pada tahun 1993 menjadi 71,8 pada tahun 2002 (Martianto dan Ariani, 2004).

Konsumsi protein sudah melampaui AKG protein yang direkomendasikan dalam WKPG dengan tingkat konsumsi terhadap AKG protein tahun 2002 sebesar 113,3 persen. Widya Karya Nasional Pangan dan GIZI (WKPG) ke VI tahun 1998 merekomendasikan AKG energi untuk penduduk Indonesia sebesar 2.200 kalori/kapita/hari dan AKG protein sebesar 48 gram/kapita/hari. Jumlah dan ragam konsumsi energi hasil SUSENAS BPS selama periode 1993-2002 seperti tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Konsumsi Energi (kal/kapita/hari) Penduduk Indonesia tahun 1993-2002, menurut ragam kelompok makanan.

Kelompok Makanan	SUSENAS 93	SUSENAS 96	SUSENAS 99	SUSENAS 02
1. Padi-padian	1.210	1.153	1.067	1.039
2. Umbi-umbian	94	58	61	55
3. Ikan	40	43	36	43
4. Daging	21	39	20	35
5. Telur dan susu	28	35	24	40
6. Sayur-sayuran	38	36	32	37
7. Kacang-kacangan	51	60	52	72
8. Buah-buahan	38	40	33	41
9. Minyak dan lemak	212	222	206	247
10. Bahan minuman	94	114	103	120
11. Bumbu-bumbuan	27	16	15	18
12. Konsumsi lainnya	16	34	29	42
13. Makanan-minuman jadi	9	170	171	198
Jumlah makanan (kal/kap/hr)	1.879	2.020	1.849	1985
Rasio konsumsi thd AKG (%)	85	92	84	90
Rasio padi-padian thd total makanan (%)	64	57	58	52
Skor PPH	66,2	69,8	62,4	71,8

Sumber: BPS (2000; 2003) diolah, Martianto dan Ariani (2004).

Keterangan: -AKG energi: 2200 kal/kapita/hari  
 - Rasio padi-padian thd total kalori PPH 50 persen.

Bennet (Harianto, 2001) menjelaskan bahwa prosentase kalori yang diperoleh dari bahan pangan pokok turun bersamaan dengan naiknya pendapatan karena terjadi diversifikasi bahan pangan sumber kalori yang dikonsumsi dengan harga tinggi dan mutunya lebih baik. Tabel 1 memberi indikasi pola diversifikasi sumber kalori mengarah ke proporsi yang meningkat untuk kelompok makanan dan minuman jadi, bahan minuman, minyak dan lemak serta pangan hewani meliputi daging, telur dan susu.

Pendapatan yang meningkat memungkinkan rumah tangga untuk membeli

bahan makanan dengan jumlah yang lebih banyak dan mutu gizi yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan konsumsi gizi baik dalam jumlah maupun mutunya. Pengeluaran rumah tangga dalam SUSENAS menjadi proksi pendapatan rumah tangga Indonesia, sehingga konsumsi gizi menurut golongan pengeluaran dapat menjadi indikasi kemampuan akses ekonomi rumah tangga terhadap pangan. Tabel 2 memperlihatkan tingkat konsumsi kalori dan sumbangan padi-padian terhadap konsumsi kalori menurut golongan pengeluaran.

Tabel 2. Konsumsi Kalori, Sumbangan Kelompok Padi-padian terhadap Konsumsi Kalori Total per kapita per hari dan Rasio Konsumsi Terhadap AKG menurut Golongan Pengeluaran Tahun 1999 dan 2002.

No	Golongan Pengeluaran Penduduk (Rp/kapita/bl)	Total konsumsi (kkal/kapita/hari)		Rasio padi-padian Thd total kalori (%)		Rasio total kalori thd AKG (%)	
		Tahun 1999	Tahun 2002	Tahun 1999	Tahun 2002	Tahun 1999	Tahun 2002
		1	Kurang 40 ribu	1.257	1.249	59	58
2	40-59,9 ribu	1.371	1.322	68	65	62	60
3	60- 79,9 ribu	1.553	1.488	67	66	71	68
4	80-99,9 ribu	1.720	1.651	63	63	78	75
5	100-149,9 ribu	1.914	1.838	59	65	87	83
6	150-199,9 ribu	2.091	2.029	53	53	95	92
7	200-299,9 ribu	2.195	2.186	47	48	100	99
8	300-499,9 ribu	2.301	2.339	40	41	105	106
9	500 ribu atau lebih	2.537	2.492	35	33	115	113
	Rata-rata	1.849	1.986	58	52	84	90

Sumber : BPS (2000; 2003), diolah.

Menggunakan Angka Kecukupan Gizi/AKG hasil Widyakarya Pangan dan Gizi VI tahun 1998 sebesar 2.200 kkal/kapita/hari, nampak rumah tangga berpengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 200.000,- mengkonsumsi kalori dibawah angka kecukupan. Dengan menggunakan angka kecukupan minimum (80% dari AKG), rumah tangga dengan pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 100.000,- menderita kekurangan kalori dan menghadapi kerawanan dalam konsumsi pangan. Pada golongan pengeluaran dengan kekurangan konsumsi kalori dan rawan

pangan (kurang dari Rp 100.000,-/kapita/bulan), permintaan beras untuk konsumsi kalori meningkat dengan tajam dan berperan strategis untuk meningkatkan konsumsi gizi. Penduduk yang berpengeluaran kurang Rp 100.000,- mencapai 42,44 persen pada tahun 1999 dan 15,66 persen pada tahun 2002.

Pada golongan pengeluaran per kapita per bulan lebih Rp 100.000,- dengan kecukupan konsumsi kalori (>80% AKG), permintaan beras untuk konsumsi kalori mulai menurun dan sumbangan kalori beras juga semakin menurun (Marwanti, 2002),

diikuti perbaikan mutu gizi melalui diversifikasi bahan pangan sumber kalori yang lebih berharga dan lebih bermutu.

Perubahan pola konsumsi masyarakat berimplikasi pada menurunnya permintaan beras/kapita/hari dan meningkatnya permintaan bahan makanan lain searah dengan perubahan ragam pangannya. Konsumsi beras menurun secara konsisten selama 1993-2002 dari konsumsi per kapita per tahun sebesar 116,00 kg pada tahun 1993 menjadi 100,00 kg pada tahun 2002. Bahan makanan jenis umbi-umbian dan daging sapi mengalami penurunan konsumsi. Bahan pangan yang konsumsinya meningkat adalah jagung, daging ayam, telur, minyak makan dan gula. Perubahan jumlah bahan makanan utama untuk konsumsi penduduk Indonesia seperti terlihat pada Tabel 3.

Selain pendapatan, kemampuan akses ekonomi rumahtangga berhubungan dengan stabilitas harga pangan. Kenaikan harga pangan yang terjadi pada periode krisis ekonomi tahun 1998 melemahkan daya beli rumahtangga terhadap pangan sehingga konsumsi kalori tahun 1999 menurun dan memerlukan waktu untuk proses pemulihannya dan konsumsi kalori sudah meningkat lagi pada tahun 2002 seperti nampak pada Tabel 1. Harga beras selama 1999-2002 relatif stabil dengan rata-rata harga beras berkisar Rp 2.700,- per kilogram. Kenaikan harga beras yang sangat tinggi juga terjadi lagi pada akhir tahun 2005 dengan kisaran harga Rp 4.600,- per kilogram, sebagai dampak menurunnya pasokan beras karena paceklik dan kebijakan menaikkan harga BBM

Tabel 3. Konsumsi Bahan Makanan Utama (kg/kapita/tahun) Penduduk Indonesia tahun 1993-2002, menurut ragam bahan makanan.

Bahan Makanan	SUSENAS 1993	SUSENAS 1996	SUSENAS 1999	SUSENAS 2002
1. Beras	116,00	111,20	103,50	100,00
2. Jagung	7,30	11,40	13,40	12,50
3. Umbi-umbian	20,00	11,50	12,80	11,60
4. Ikan	15,10	15,30	12,90	15,40
5. Daging Sapi	0,78	0,73	0,52	0,57
6. Daging Ayam	2,44	3,54	1,72	3,28
7. Telor	3,28	4,58	3,12	4,94
8. Minyak Makan	6,66	7,12	6,95	8,20
9. Gula	9,52	10,02	9,20	10,30

Sumber: BPS (2000; 2003) diolah, Kasryno (2004).

Meningkatnya jumlah dan mutu gizi rata-rata penduduk Indonesia yang ditunjukkan oleh meningkatnya rasio konsumsi terhadap AKG dan konsumsi kalori dari sumber bahan makanan yang beragam berkaitan dengan pemasaran PUGS (pedoman umum gizi seimbang) dan PPH (pola pangan harapan) kepada masyarakat agar lebih sadar gizi sehingga lebih memotivasi masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif mewujudkan ketahanan konsumsi pangan rumah tangga yang akan menjadi fondasi kokoh untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Apabila setiap rumah tangga memiliki kemampuan akses ekonomi (daya

beli) dan akses fisik (daya jangkau) dan ketersediaan pangan cukup dan berkelanjutan, maka upaya mewujudkan Indonesia berketahanan pangan akan lebih mudah dicapai. Persoalannya sekarang adalah: ada ancaman terhadap ketersediaan pangan di tingkat wilayah atau rumahtangga sebagai akibat gagal panen, bencana alam, dan menurunnya cadangan sehingga pasokan pangan menurun, sementara kebutuhan beras untuk bantuan pangan meningkat yang berakibat harga beras meningkat hampir dua kali lipat dan inflasi yang tinggi karena harga barang lain juga meningkat. Untuk mengamankan keterediaan, keputusan impor

awal tahun 2005 telah menimbulkan kontroversi dan polemik.

Peningkatan harga beras yang tinggi menjadi incentive bagi petani padi untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya sehingga pendapatan rumahtangga dapat meningkat, namun bagi rumahtangga konsumen akan berdampak pada penurunan yang nyata dalam konsumsi beras. Pengaruh perubahan harga dan pendapatan terhadap konsumsi beras berbeda antar golongan pendapatan, dengan golongan pendapatan rendah nilai elastisitasnya -0,97 dan 0,91; golongan pendapatan menengah nilai elastisitasnya -0,70 dan 0,74 sedangkan golongan pendapatan tinggi nilai elastisitasnya -0,51 dan 0,48 (Harianto, 2001).

Meningkatnya harga pangan berakibat menurunnya pendapatan riil yang akan semakin mempersulit sebagian besar rumahtangga untuk mengakses pangan sesuai AKG konsumsi, sehingga ketahanan konsumsi pangan rumahtangga terancam melemah. Meskipun angka rata-rata nasional sebagai indikasi ketahanan pangan makro kurang memadai untuk indikasi ketahanan pangan mikro, tetapi gambaran konsumsi pangan menurut golongan pengeluaran tahun 1999 dapat menjadi petunjuk golongan penduduk yang beresiko kekurangan konsumsi pangan minimal dan bila berlanjut dalam rentang waktu lama menyebabkan rawan pangan kronis.

### KERAWANAN PANGAN

Kerawanan pangan dapat terjadi karena adanya rintangan selama perjalanan pangan, baik kerawanan pangan kronis karena kekurangan konsumsi pangan dalam rentang waktu tertentu, atau kerawanan pangan sementara karena terjadinya bencana alam atau bencana lainnya termasuk krisis ekonomi.

Keberlanjutan penyediaan pangan padi-padian dari produksi dalam negeri mengalami penurunan pertumbuhan sehingga kesenjangan antara pertumbuhan produksi dan pertumbuhan kebutuhan semakin melebar. Produksi dalam negeri

dapat memenuhi 95 % kebutuhan masih dikatakan aman dan sisanya 5 % dipenuhi dari perdagangan pangan sebagai bagian komitmen liberalisasi perdagangan (Alexandratos, 1995; Suryana, 2004; Kasryno, 2004). Perkiraan kebutuhan beras mencapai 32 juta ton sementara kemampuan produksi beras sekitar 30 juta sehingga terjadi deficit beras sekitar 2 juta ton (>6%) yang ditutup dari impor.

Kerawanan ketersediaan pangan terjadi apabila Indonesia semakin tergantung pada impor yang cenderung meningkat jumlahnya, sementara beras dalam pasar dunia tergolong tipis (sekitar 7% dari produksi total) dengan volume perdagangan sekitar 24 juta ton dan lebih 80 % dipasok 6 eksportir besar terdiri Thailand, Vietnam, Amerika Serikat, Cina, India dan Pakistan.

Menurunnya cadangan pangan pemerintah karena penyaluran bantuan pangan untuk kelompok sasaran rawan pangan akibat bencana dan OPK (operasi pasar khusus) kelompok berpendapatan rendah serta menurunnya cadangan pangan di tingkat petani produsen karena paceklik melemahkan ketahanan pangan nasional sebagai akibat melemahnya stabilitas penyediaan pangan dan stabilitas harga. Saifullah (2001) mengemukakan, pengelola cadangan beras milik pemerintah dipegang oleh Bulog yang memiliki sekitar 1500 gudang tersebar di daerah produsen dan konsumen dengan kapasitas gudang sekitar 3,5 juta ton sementara rata-rata volume cadangan pangan yang dikelola sekitar 5% dari ketersediaan nasional.

Kerawanan konsumsi pangan rumahtangga terjadi pada rentang waktu dimana rumahtangga mengalami ketidakcukupan pangan untuk memenuhi angka kecukupan pangan minimal (80 % angka kecukupan) bagi pertumbuhan dan kesehatan para individu anggotanya. Terbatasnya sumberdaya ekonomi rumahtangga menyebabkan terbatasnya kemampuan akses ekonomi dan terbatasnya daya beli paling menentukan terjadinya rawan konsumsi pangan. Rumahtangga dengan pendapatan rendah akan menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk membeli bahan makanan sehingga

meningkatnya bagian pendapatan yang dikeluarkan untuk konsumsi makanan dapat menjadi petunjuk menurunnya kesejahteraan rumahtangga. Elastisitas harga dan elastisitas pendapatan terhadap konsumsi pangan rumahtangga berpendapatan rendah lebih sensitive dari pada rumahtangga berpendapatan tinggi

Penurunan pendapatan atau kenaikan harga akan menurunkan konsumsi yang lebih besar pada rumah tangga berpendapatan rendah, sehingga meningkatkan resiko rawan konsumsi pangan. Oleh karena itu menjaga stabilitas harga pangan beras dan meningkatkan pendapatan penduduk berpendapatan rendah, sangat berguna untuk mengatasi kelompok rawan konsumsi pangan. Martianto dan Ariani (2004) mengemukakan adanya peningkatan yang tajam jumlah rumah tangga kekurangan konsumsi energi tahun 1996 ke tahun 1999 sebagai dampak krisis ekonomi tahun 1998, namun jumlahnya menurun kembali pada tahun 2002. Rumah tangga kekurangan konsumsi pangan berada pada golongan berpendapatan rendah (40% terbawah) dan rumahtangga berpendapatan menengah (40% di tengah).

Semakin tidak meratanya distribusi pengeluaran memberi indikasi semakin menurunnya bagian pengeluaran nasional yang dibelanjakan penduduk berpendapatan rendah (40% terbawah) dan dapat memperbesar resiko rawan pangan, meskipun telah terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran riil. Peningkatan pengeluaran riil (setelah dideflasi) selama periode 1999-2002 sebesar 15,96 persen (Kasryno, 2004), tetapi distribusinya semakin tidak merata yang ditunjukkan kenaikan nilai gini-rasio dari 0,308 pada tahun 1999 menjadi 0,329 pada tahun 2002 (BPS, 2003).

Kekurangan konsumsi pangan seperti diindikasikan konsumsi kalori pada Tabel 2 terjadi pada rumah tangga dengan pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 100.000,- atau setara dengan nilai tukar beras 38 kg (harga beras Rp 2630,-/kg pada tahun 1999-2002). Bagian pendapatan yang dikeluarkan untuk konsumsi makanan

rumahtangga berpendapatan kurang dari Rp 100.000,- mencapai 68 persen.

Menggunakan batas kemiskinan Sayogyo setara NTB 40 kg dengan harga beras saat ini Rp 4.500,-/kg, maka penduduk dengan pengeluaran kurang Rp 180.000,- per kapita per bulan diperkirakan kekurangan konsumsi pangan. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana membantu kelompok rumahtangga rawan pangan dapat menjumlah penduduk miskin semakin tinggi (Rp 105.200,-), maka rumahtangga kekurangan konsumsi kalori termasuk rumahtangga miskin. Kenaikan harga pangan menjadi Meningkatkan jumlah penduduk miskin memperbesar resiko meluasnya kondisi rawan konsumsi pangan.

## PENGELOLAAN KONSUMSI PANGAN

Perubahan pola konsumsi penduduk selama tahun 1993-2002 secara konsisten yang menghasilkan skor PPH lebih tinggi menjadi momentum untuk merubah kebijakan ketahanan pangan yang masih bias pada beras kepada kemandirian penyediaan pangan secara luas. Revitalisasi pertanian dalam arti luas sangat diperlukan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup dalam jumlah, mutu dan keamanan secara berkelanjutan. Pola pembangan pertanian pangan seharusnya merespon perubahan pola konsumsi pangan penduduk sehingga ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi dan pembiayaan untuk impor juga berkurang.

Momentum perubahan pola konsumsi penduduk ini perlu diikuti kebijakan pengelolaan konsumsi pangan tingkat rumahtangga karena ketahanan konsumsi pangan rumahtangga merupakan dasar terwujudnya ketahanan pangan negara dengan masalah mendasar keterbatasan akses ekonomi dan akses fisik dari rumahtangga berpendapatan rendah untuk mendapatkan pangan.

Kebijakan pengelolaan konsumsi pangan ditujukan untuk memacu proses diversifikasi konsumsi pangan individu, keluarga dan masyarakat melalui perubahan pola konsumsi pangan ke arah yang lebih beragam dan bergizi seimbang sehingga terwujud masyarakat sadar gizi yang mampu

merealisasi ketahanan konsumsi pangan rumahtangga yang kokoh. Rintangan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan konsumsi pangan rumah tangga yang kokoh perlu diatasi dengan intervensi pemerintah dalam bentuk berbagai instrument program yang selama ini sudah dikenal tetapi perlu revitalisasi pelaksanaan maupun pelaksanaannya.

Instrumen kebijakan pengelolaan konsumsi pangan meliputi a) pendidikan dan penyuluhan b) pengembangan produk pangan non beras c) pemberdayaan ekonomi rumahtangga d) intervensi pangan murah untuk kelompok rawan pangan.

Dampak kebijakan yang diharapkan dapat dicapai adalah a) semakin banyak anggota masyarakat sadar gizi yang tahu pedoman umum g. . seimbang, memahami pentingnya pilihan pola pangan harapan dan berusaha memiliki daya beli terhadap bahan makanan yang cukup jumlah, mutu dan keamanannya; b) diversifikasi produk pangan sehingga lebih banyak pilihan jenis makanan jadi yang dapat dikonsumsi dan mengurangi ketergantungan terhadap beras; c) pemberdayaan ekonomi rumahtangga produk pangan primer maupun produk pangan turunannya melalui UMKM akan memperbesar kapasitas ekonomi wilayah yang akan menjadi sumber peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja d) transfer pendapatan kepada kelompok penduduk yang sangat rawan pangan akan mempermudah akses ekonomi terhadap pangan sehingga kondisi kritis akibat gizi buruk dapat dihindari.

## PENUTUP

Persoalan ketahanan pangan ditandai oleh ketersediaan yang cukup tetapi kemampuan akses rumahtangga terhadap pangan belum cukup. Dalam upaya membangun sumberdaya manusia yang lebih berkualitas, pengelolaan konsumsi pangan untuk meningkatkan kemampuan akses rumahtangga lebih menentukan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan rumahtangga. Dengan demikian upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumahtangga perlu

mendapat perhatian yang lebih besar di masa-masa mendatang.

Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah melaksanakan peran fasilitasi dan intervensi sesuai kewenangan otonominya untuk lebih memperbaiki system produksi, distribusi dan pengelolaan konsumsi untuk memperkokoh ketersediaan dan stabilitas penyediaan pangan secara berkelanjutan dan dapat dijangkau oleh rumahtangga. Masyarakat pelaku kegiatan produksi-distribusi-konsumsi dan perbaikan gizi melaksanakan kegiatan masing-masing secara efisien, berkelanjutan dan lebih bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexandratos, N, 1995, *World Agriculture: Towards 2010, An FAO Study*, published by FAO and John Willey & Sons: Chichester.
- Arifin, B, 2004, "Penyediaan dan Aksesibilitas Ketahanan Pangan" dalam *Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII*, Jakarta 17-19 Mei 2004.
- Badan Pusat Statistik, 2000, *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia: SUSENAS 1999 Buku 2 dan 3*, BPS Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2003, *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia: SUSENAS 2002 Buku 2 dan 3*, BPS Jakarta.
- Hariato, 2001, "Pendapatan, Harga dan Konsumsi Beras" dalam *Bunga Rampai Ekonomi Beras*, LPEMUI.
- Kasryno, F, 2004, "Kebijakan Pembangunan Pertanian dalam Era Globalisasi dan Otonomi: Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan" dalam *Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII*, Jakarta 17-19 Mei 2004.

- Mardianto dan Ariani, 2004," Analisis Perubahan Konsumsi dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Dalam Dekade Terakhir" , dalam *Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII*, Jakarta 17-19 Mei 2004.
- Marwanti,S, 2000, " Perkembangan Pemikiran Tentang Ketahanan Pangan" dalam *Carakatani XV* Nomor 1, Maret 2000.
- Marwanti,S, 2001, " Tinjauan Aspek Ketersediaan Pangan dan Gizi Dari Ketahanan Pangan Nasional" dalam *Caraka Tani XVI* Nomor 1, Maret 2001.
- Marwanti, S, 2002, " Pola Pengeluaran Untuk Konsumsi Pangan Gizi Penduduk Indonesia (Analisis Data Susenas 1999)" dalam *Carakatani XVII* Nomor 2, Oktober 2002.
- Saifullah, 2001," Peran Bulog dalam Kebijakan Perberasan Nasional" dalam *Bunga Rampai Ekonomi Beras*, LPEMUI.
- Soetrisno,N, 1995, " Ketahanan Pangan Dunia: Konsep, Pengukuran dan Faktor Dominan" dalam *Pangan* Nomor 21 Vol. V, 1995.
- Soetrisno,N, 1998," Ketahanan Pangan" dalam *Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI*, Jakarta 17-20 Februari.
- Suryana, A, 2004, " Ketahanan Pangan Di Indonesia" dalam *Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII*, Jakarta 17-19 Mei 2004.